

EDISI SELASA / 10 Maret 2020

LENTERA

Inspirasi Perubahan **TODAY**HARIAN UNTUK UMUM
TERBIT SENIN - JUMAT
12 HalamanE-mail redaksi@lenteratoday.com
Redaksi 031-87854491
Iklan 031-87854491
Kantor Redaksi
Jl. Rungkut Asri Utara VI no 26
Surabaya

Setiap ide berasal dari mana saja. Bukalah mata dan pikiranmu terhadap ide dan hal-hal baru. Kau harus percaya bahwa ada pintu terbuka yang memang dikhususkan untukmu kesana

Melinda Gates, Co-founder
Melinda Gates Foundation



IURAN BPJS

IURAN BPJS KESEHATAN BATAL NAIK

Kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang menjadi salah satu beban berat bagi masyarakat di tahun ini. Tapi angin segar berembus, karena Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam putusannya, MA membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020.

(Baca, Hal 11)

BESARAN IURAN YANG BATAL :

- Sebesar Rp 42.000 (Kelas III)
- Sebesar Rp 110.000 (Kelas II)
- Sebesar Rp 160.000 (Kelas I)

BESARAN IURAN YANG BERLAKU :

- Sebesar Rp 25.500 (Kelas III)
- Sebesar Rp 50.000 (Kelas II)
- Sebesar Rp 80.000 (Kelas I)

ALASAN KENAIKAN BPJS KESEHATAN

- Dana Masuk Rp 6 triliun/bulan
- Dana Keluar Rp 7,5 triliun/bulan
- Defisit Rp 1,5 triliun/bulan



TERKENDALA LISTRIK & INTERNET, UJIAN 6 SEKOLAH DI JATIM MANUAL

Surabaya - Ujian sekolah tingkat SMA/SMK di Jatim telah berbasis Ujian Satuan Pendidikan Berbasis Komputer dan Smartphone (USP-BKS). Itu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud).

Sayangnya, masih ada 6 sekolah tingkat SMA di Jatim yang melaksanakan Ujian Satuan Pendidikan (USP) secara manual atau belum berbasis komputer dan smartphone. Khofifah menyebut enam sekolah itu berada di Pulau Kangean, Sumenep.

"Jadi di Pulau Kangean khususnya, bukan hanya karena akses internet yang belum bisa dijangkau, tetapi juga untuk aliran listrik belum ada di daerah tersebut. Pemprov baru meresmikan, sedangkan yang lain masih menggunakan genset. Layanan kesehatan juga di sana mengalami kendala, karena power plant. Saya sudah mengkomunikasikan dengan PLN, 22 Pulau yang lain mudah-mudahan kita

bisa selesaikan di tahun ini," ujar Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat mengecek langsung pelaksanaan USP-BKS di SMA 6 Surabaya Senin (9/3).

Sementara, di SMA 6 Surabaya, pelaksanaan ujian sudah memasuki hari keenam ujian untuk sekolah tingkat SMA. "Jadi saya mengecek kesiapan sebenarnya dari sekolah di mana, rata-rata dari 12 kelas yang melaksanakan ujian, menggunakan laptop," katanya.

Untuk 2020, lanjut Khofifah, USP-BKS masih dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut merupakan hasil dari rapat kerja Majelis Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Jawa Timur pada 30 Desember 2019. "Waktunya bisa berbeda, formatnya juga bisa berbeda antarprovinsi. Kalau di Jatim sudah dimulai dari tanggal 2 Maret yang lalu. Inshaallah hari Rabu lusa merupakan hari terakhir untuk USP BKS tingkat SMA. Untuk SMK sudah selesai pada tanggal 5 Maret yang lalu," jelasnya.

Khofifah ingin USP-BKS SMA/SMK 2020 berjalan dengan baik di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Jatim. Sedangkan untuk 2021 mendatang, Khofifah belum tahu siapa yang akan

memegang kendali USP-BKS.

"Apakah nanti di tahun depan masing-masing sekolah kemudian mengambil posisi untuk menyiapkan soalnya (soal ujian sekolah), dan segala sesuatunya diurus secara mandiri di satuan pendidikan masing-masing, atau bagaimana kita lihat ke depannya," terangnya.

Khofifah memaparkan, saat ini ada dua persentase penilaian kelulusan siswa. Yang pertama yakni 60 persen dari hasil belajar mereka siswa sejak semester 1 sampai semester 6. Sementara 40 persen lagi dari hasil USP-BKS.

"Sejak tahun lalu, UAN atau Ujian Nasional ini sebetulnya dalam komposisi kelulusan itu sudah tidak ada. Tetapi bahwa makna secara psikologis tetap anak-anak menjadikan itu bagian dari puncak prestasinya," imbuhnya.

Mantan Mensos RI menilai, NEM (Nilai Ebtanas Murni) bagi wali murid tetap menjadi hal penting. Meski saat ini pendidikan dalam konsep merdeka belajar karena pada tahun depan sudah tidak ada lagi ujian nasional. Sebagai gantinya adalah assessment kompetensi minimal. (ins, dtc)



Agung Firman Sampurna
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sebesar Rp 16,81 triliun. Itu terdiri dari kerugian yang disebabkan investasi saham dan reksadana.

"Kerugian negaranya adalah sebesar Rp 16,81 triliun. Terdiri dari kerugian negara (akibat) investasi saham sebesar Rp 4,65 triliun, dan kerugian negara akibat investasi di reksadana sebesar Rp 12,16 triliun," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna saat jumpa pers di Kantor Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (9/3).

Dia menjelaskan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus perusahaan asuransi pelat merah tersebut.

"Kami sampaikan bahwa metode

NEGARA RUGI RP 16,81 T DARI KASUS JIWASRAYA

yang kami gunakan dalam melakukan perhitungan kerugian negara adalah total lost, di mana seluruh saham-saham yang diduga dibeli secara melawan hukum dianggap berdampak (merugikan negara)," jelasnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya BPK sudah merampungkan penghitungan kerugian negara sejak Rabu atau Kamis pekan kemarin. Namun sampai akhirnya diumumkan, pihaknya melakukan penyempurnaan dan pemutakhiran data yang dibutuhkan terkait pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan kasus di Jiwasraya.

Setelah ini penegakan hukum bisa dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). "Alhamdulillah hari ini rampung sepenuhnya sehingga perhitungan kerugian negaranya baru saja telah kami sampaikan dan kami harapkan konstruksinya sudah lengkap sehingga tahapan penegakan hukum dapat dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung," tambahnya.

Dicicil Akhir Bulan Ini

Terpisah, Kementerian Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) memastikan pembayaran dana nasabah tahap pertama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dibayarkan akhir bulan ini. Pembayaran itu menunggu pembahasan panitia kerja (Panja) Komisi VI dan XI.

"Secara planning kami nanti sekitar akhir Maret pemerintah dan komisi VI dan XI di sisi lain dari segi keuangan itu akan rapat panja lagi," kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Kementerian BUMN Jakarta Pusat.

Arya mengatakan, dalam rapat itu akan dibahas skema penyesuaian serta pembayaran dana nasabah. Sejalan dengan itu, pihaknya menyiapkan dana nasabah. "Nah dari sana, kami sudah menyiapkan skema juga BUMN, untuk bisa melakukan pembayaran kepada para nasabah tahap pertama pada bulan Maret ini, setelah rapat Panja itu. Skema dan dana sudah kita siapkan juga," sambungnya.

Meski demikian, Arya belum membeberkan nasabah mana yang akan mendapat pembayaran tersebut, apakah nasabah tradisional atau JS saving plan. Berikut juga besaran yang akan dibayarkan. "Nanti kita tunggu aja," tambahnya. (ins)

DPRD SURABAYA: SURAT IJO TIDAK BISA DIHAPUSKAN

Surabaya-Polemik surat ijo di Kota Surabaya terus meruncing. Warga pemegang surat ijo melakukan demo di depan gedung DPRD Kota Surabaya, Senin (9/3) dengan tuntutan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) dan retribusi surat ijo. Dalam aksinya mereka membawa spanduk bertuliskan 'Warga Surat Ijo Kertajaya Cabut Perda dan Retribusi'.

Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya John Thamrun yang menerima aduan masyarakat terkait penghapusan surat ijo mengatakan jika masalah ini perlu didiskusikan kembali di Pansus. "Kita tidak bisa memutuskan secara langsung apa yang mereka minta dan harapkan. Jadi masukan dari mereka akan kami pertimbangkan akan kami pelajari lebih lanjut didalam rapat," katanya.

John menjelaskan bahwasanya penghapusan surat ijo masih perlu dicek kembali dasar hukumnya. Kalau memang merupakan aset Pemkot tidak mungkin kalau tidak dikenakan retribusi, begitu pula sebaliknya. "Jika Pansus retribusi tidak menemukan bahwa itu aset pemkot ya gak bisa dong dikenakan retribusi. Tapi kalau memang aset kekayaan daerah, ya benarkan harus ada retribusi," jelasnya. John juga mengatakan bahwasanya perlu dikaji ulang terkait penghapusan surat ijo. Alternatifnya jika memang itu aset pemerintah retribusinya bisa lebih rendah

dari sebelumnya.

Sebelumnya, dalam orasi Ketua Perkumpulan Penghuni Tanah Surat Ijo (P2TSIS), Indung Sutrisno mengatakan, "Kami me-minta kepada DPRD Surabaya untuk mencabut perda dan retribusi."

Menurutnya, selama ini penghuni surat ijo tidak pernah menerima dana sebagai ganti rugi tanah. Menurut Indung, APBD tidak mengeluarkan dana untuk rakyat sebagai biaya pembelian tanah, sehingga menurut peraturan, tanah surat ijo ini tidak dibeli oleh pemerintah.

"Buktinya sekarang hampir 300 warga membuat pernyataan tidak pernah menerima pembayaran satu peserpun dari pemkot," ungkapnya.

Lebih lanjut Indung mengatakan, penguasaan atas tanah itu tidak sah karena menurutnya tanah itu dikuasi oleh pemkot saat tanah itu kosong. "Sekarang sudah ada bangunan dan ada penghuninya," katanya. Bahkan, Indung menjelaskan, penghuninya tidak pernah diajak musyawarah bahwa ini akan dikuasai dengan HPL.

Penggunaan tanah, kata Indung, menurut UU agraria HPL mengatakan tanah boleh dimiliki atau dikuasi oleh pemkot, tetapi untuk digunakan kepentingan pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya. Tetapi, menurut Indung, tanah ini bukan digunakan untuk tugas



Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya John Thamrun (tengah) menemui warga penghuni tanah Surat Ijo yang melakukan aksi di depan DPRD Surabaya

pembangunan pemerintahan tapi dikuasai untuk menjadi milik Pemkot. "Dari dasar itu, kemudian ditarik retribusi berkali kali lipat dari PBB, sehingga tanah itu digunakan sebagai penindasan kepada rakyat," paparnya.

Atas dasar itu, pihaknya memohon beberapa hal kepada DPRD Surabaya. "Pertama tidak memasukan tanah surat ijo sebagai objek Raperda pengelolaan barang milik daerah," beber Indung.

"Kedua agar tidak ditarik retribusi penggunaan kekayaan daerah karena dinilai tanah itu bukan kekayaan daerah. Ketiga, Perda Izin Pemakaian Tanah (IPT) harus dicabut karena hanya punya kebenaran formal tetapi tidak punya kebenaran material. Keempat, memohon Pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Surabaya ikut mendorong walikota segera mengembalikan hak atas tanah kepada rakyat. Kelima, pengembalian tanah tanpa biaya apapun ini juga merupakan kebijakan dan janji dari walikota Surabaya Tri Risma- harini," pungkasnya. (ard)

DPRD TEMUKAN PELANGGARAN PERJANJIAN OUTSOURCING DI PEMKOT BLITAR

Blitar - DPRD Kota Blitar menemukan dugaan pelanggaran perjanjian kontrak kerja sama, antara Pemkot Blitar dengan pihak ketiga selaku rekanan penyedia tenaga outsourcing. Pemkot diminta melakukan evaluasi dan memberikan teguran bila hal tersebut terbukti.

Temuan itu ditemukan pada kontrak kerja sama dengan pihak ketiga rekanan penyedia tenaga outsourcing Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) di Satpol PP. "Kami minta Pemkot Blitar mengevaluasi kontrak kerjanya, kalau memang ditemukan pelanggaran Pemkot harus memberikan teguran atau peringatan ke pihak ketiga," tutur Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Blitar, Nuhan Eko Wahyudi usai rapat dengan Satpol PP Kota Blitar, Senin(9/3).

Dijelaskan Nuhan jika rapat ini menindak lanjuti informasi yang diterima, tentang masalah dugaan pemotongan gaji ratusan Banpol yang dilakukan pihak ketiga. Ternyata dari kontrak kerja ada beberapa

point yang diduga dilanggar oleh pihak ketiga.

Pertama soal kantor perwakilan perusahaan penyedia tenaga outsourcing Banpol. Sesuai kontrak kerja, rekanan harus memiliki kantor perwakilan di Kota Blitar. "Tapi sampai sekarang rekanan tidak memiliki kantor perwakilan di Kota Blitar, perusahaan itu berada di Jakarta," jelas politikus PPP itu.

Dugaan pelanggaran kedua, kata Nuhan, sesuai kontrak pihak ketiga memberikan gaji sesuai UMK ke Banpol yaitu sebesar Rp 1,95 juta. "Tapi yang terjadi, ratusan Banpol protes karena gaji yang diterima tidak sesuai atau di bawah UMK. Kalau benar berarti itu pelanggaran kedua," tandasnya.

Nuhan mendesak agar Pemkot Blitar mengevaluasi kontrak kerja sama dengan pihak ketiga. Bukan hanya untuk Pol PP, tapi dinas lain juga seperti Dishub, Dinkes, Dagin dan lainnya.



Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) saat melakukan protes besaran gaji ke Satpol PP Kota Blitar

Pemkot juga harus berani memberikan teguran atau peringatan pada pihak ketiga, kalau memang ditemukan pelanggaran. "Kalau sudah diberi surat peringatan pertama kedua dan ketiga tetap tidak berubah, Pemkot bisa memutuskan kontrak kerja dengan pihak ketiga," tegasnya.

Secara terpisah Plt Kepala Satpol PP Kota Blitar, Hadi Maskun ketika dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan akan meminta penjelasan pada pihak ketiga terkait hal itu. Diakuinya gaji yang diterima Banpol memang berkurang, nominalnya di bawah UMK. "Kenapa berkurang, itu yang bisa menjawab pihak ketiga. Kami akan minta penjelasan dulu ke pihak ketiga," jawabnya. (Ais)

DUH! ATAP SDN PELEM 3 PONOROGO NYARIS AMBRUK

Ponorogo- Musim hujan yang disertai angin kencang membahayakan bagi siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Pelem 3 Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo. Pasalnya, atap empat kelas di sekolah tersebut nyaris ambruk. Sekolah itu diketahui tidak pernah terjamah oleh perbaikan sejak 20 tahun lalu.

Atap yang rusak itu berada di kelas 1 hingga kelas 4 dan mengganggu para siswa saat proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Tercatat total ada 76 siswa yang bersekolah di SDN Pelem 3 dari kelas 1 hingga kelas 4. "Kondisi plafon banyak yang lepas dan menggantung, takut nanti kena anak-anak," kata Wakil Kepala SDN Pelem 3, Misroto, Senin (9/3).

Ia menyebut sejak Tahun 2000 bangunan sekolah belum disentuh perbaikan. Tidak heran jika kondisi atap pada bagian kayu banyak yang keropos akibat dimakan rayap.

"Ada beberapa genteng hilang tersapu angin saat hujan deras. Ada juga kayu atap yang terkena air akhirnya keropos. Sudah 2 tahun ini," ujarnya. Selain ruang kelas, kerusakan juga terjadi di ruang dapur dikarenakan pondasi bangunan yang rendah dan membuat tembok keropos terkena air. "Tempatnya masih dipakai seperti biasa.

Ya mau gimana lagi karena tidak ada ruangan lain," ujar dia.

Longsor Tugurejo

Sementara itu terkait cuaca ekstrem, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo membangun 5 pos pantau di lokasi longsor yang berada di Dusun Tugunongko, Desa Tugurejo. "Kami dirikan 5 pos pantau untuk memantau pergerakan material longsor maupun material di bukit yang belum longsor," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Setyo Budiono, Senin (9/3).

Dijelaskannya, karakteristik gerakan longsor di Dusun Tugunongko cenderung lamban, namun terus bergerak saat turun hujan. Sementara, curah hujan sepekan ke depan diprediksi masih cukup tinggi di wilayah Slahung berdasar prediksi cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

"Intensitas hujan masih cukup tinggi. Karena itu perlu terus diamati perkembangannya," ujarnya.

Saat ini, kondisi bukit yang berjarak



Kondisi atap SDN Pelem 3 Ponorogo yang rusak parah

seratus meter dari pemukiman warga itu dianggap berbahaya karena kontur tanahnya masih labil. Pihak BPBD juga menemukan ada dua sumber air baru di seputar lokasi longsor. "Jadi memang sebelumnya ada sumber air. Sekarang muncul dua sumber baru," kata dia.

Untuk pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemkab Ponorogo melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang pengungsi. Kadinkes, drg Rahayu Kusdarini menjelaskan pemeriksaan itu dilakukan untuk mengantisipasi penyakit yang muncul karena bencana. "Alhamdulillah tidak ada yang sakit. Semua sehat dan akan terus kami pantau," katanya. (jtn,ins)

PRIORITAS PENATAAN TRANSPORTASI MADIUN

PEJALAN KAKI HINGGA ANGKUTAN MASSAL

Surabaya- Tak hanya memperindah wajah kota, kali ini Wali Kota Madiun, Maldi berupaya untuk menata sarana dan prasarana transportasi. Apalagi saat ini, Kota Pendekar terus berkembang yang potensi meningkatkan volume lalu lintas.

Maldi membeberkan jika pemkot mempunyai empat skala prioritas sektor transportasi dan lalu lintas. "Pertama penataan fasilitas pejalan kaki, peningkatan pelayanan perizinan, pelayanan angkutan umum yang murah dan peningkatan teknologi dibidang sarana dan pra sarana jalan," ungkapnya usai Musrenbang Sektor Transportasi di Ruang Aula I-Club, Kota Madiun, Senin (9/3).

Saat ini, fasilitas pejalan kaki di Kota Madiun sangat mumpuni. Beberapa ruas bahkan sudah dilengkapi kursi santai yang bisa digunakan pejalan kaki untuk beristirahat sejenak. Lampu-lampu jalan juga sudah terpasang, sehingga saat malam hari

pengguna trotoar juga merasa aman dan nyaman.

Lebih detail, Walikota Maldi menambahkan jika ia akan fokus menata arus transportasi jalan. Dia mengaku jika saat ini Kota Madiun sudah semakin padat, oleh karena itu ia berencana membuat sistem pengalihan jalan, guna meminimalisir kepadatan lalu lintas. "Insyaallah pengalihan-pengalihan itu ada kajiannya semuanya. Satu hal yang perlu diketahui, kota kita padat luar biasa apalagi hari jumat, Sabtu dan Minggu," katanya.

"Nah ini akan ada peralihan-peralihan contohnya dari perempatan Jalan Tamrin patung pendekar, nah itu kalau ke Ponorogo dibelokkan kiri lewat Tanjung Raya langsung kan bisa. Itu lebih efektif dan tidak mengakibatkan macet," tambah walikota kelahiran Magetan ini.

Dengan adanya beberapa perubahan itu ia berharap Kota Madiun semakin kon-



Wali kota Madiun, Maldi

dusif dalam segala sektor. Selain itu penataan ini juga dikatakan linier dengan program kerja pemerintah pusat maupun daerah. (Sur)

PILKADA 2020, GOLKAR JATIM TARGETKAN **KEMENANGAN 60%**

SURABAYA - Pilkada Serentak 2020 di Jatim akan memilih 19 calon kepala daerah. Partai Golkar Jawa Timur di bawah kepemimpinan Ketua DPD yang baru, Sarmuji, memantapkan target 60% kemenangan di pesta demokrasi daerah tahun ini.

"Kami menargetkan 60 persen kemenangan. Selain target kemenangan, pilkada juga menjadi ajang konsolidasi partai," kata Ketua DPD Golkar Jatim terpilih, Sarmuji dikutip, Senin (9/3).

Untuk mewujudkan target tersebut, pihaknya telah merancang sejumlah upaya. Di antaranya dengan memetakan daerah mana saja yang berpeluang untuk dapat mengusung sendiri. Sebab, sekalipun cukup dominan di beberapa daerah, Golkar masih membutuhkan rekan koalisi dalam mengusung calon. "Kendala kami di beberapa daerah kabupaten/kota tidak bisa berangkat sendiri," kata Sarmuji. "Sehingga, harus berkoalisi dengan partai lain," jelas Anggota DPR RI dari dapil Jatim

1 ini.

Apabila ada kader yang cukup dominan dan berpotensi, pihaknya pada prinsipnya akan lebih mengutamakan. "Kami tetap mementingkan kader yang memungkinkan untuk dimajukan," tandasnya.

Namun, Sarmuji belum menjelaskan daerah mana saja yang akan menjadi prioritasnya. Menurutnya, hal tersebut akan menjadi salah satu kajian pihaknya.

Untuk diketahui, Sarmuji baru saja terpilih sebagai Ketua DPD Golkar Jatim periode 2020-2025 melalui Musda Golkar Jatim, Kamis-Sabtu (5-7/3/2020) lalu. Sarmuji terpilih melalui musyawarah mufakat (aklamasi).

Selain memilih ketua DPD, ajang tersebut juga membahas rekomendasi di Pilkada 2020. Untuk diketahui, sebanyak 19 daerah akan melaksanakan pilkada serentak. Di sejumlah daerah, Golkar memang cukup dominan. Misalnya, di Surabaya, Tuban, hingga Kota Pasuruan. Di beberapa daerah tersebut cukup terbuka



Ketua DPD Golkar Jatim, Sarmuji

kemungkinan untuk mengusung dari kader internalnya.

Di Surabaya, ada nama Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, KH Zahrul Azhar Asumta As'ad atau yang akrab disapa Gus Hans. Bahkan, nama Gus Hans juga masuk dalam deretan calon populer.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Jawa Timur meminta pengurus daerah untuk menyiapkan lima nama di masing-masing daerah yang akan disampaikan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Dari usulan itu, DPD provinsi akan menyampaikan usulan ke DPP. DPP akan melakukan penjaringan, yang didasarkan atas berbagai pertimbangan. (ins)

BAWASLU KABUPATEN BLITAR

BELASAN CALON PPS **TERINDIKASI PENGURUS PARPOL**

Blitar - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Blitar menemukan belasan calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pilbup 2020 terindikasi anggota dan pengurus partai politik (parpol). Melihat temuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Blitar diminta untuk melakukan klarifikasi ulang.

Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa menyampaikan jika hasil pengecekan Bawaslu menemukan belasan nama para calon anggota PPS yang masuk dalam Sipol. "Dengan rincian 13 nama masuk ke dalam Sistem Informasi Parpol (Sipol) dan 2 nama masuk ke dalam pengurus Parpol," tutur Priya, Senin (9/3).

Belasan nama calon anggota PPS yang diteliti tersebut tercantum pada pengumuman KPU Kabupaten Blitar Nomor 126/PP.04.2-Pi/KPU-Kab/II/2020 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar Tahun 2020 tertanggal 28 Februari 2020.

Dijelaskan Priya, jika sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (1) huruf e PKPU Nomor 13 Tahun 2017 terkait syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS adalah

tidak menjadi anggota parpol. "Yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam jangka waktu 5 tahun, tidak lagi menjadi anggota parpol yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus parpol bersangkutan," jelasnya.

Priya menegaskan, penyelenggara di setiap tingkatan harus netral, serta tidak berafiliasi dengan parpol atau pihak manapun. Sehingga sejak dari rekrutmen sudah harus diperhatikan, serta sesuai dengan peraturan tugas Priya.

Menyusul temuan ini, Bawaslu Kabupaten Blitar telah melayangkan surat rekomendasi kepada KPU Kabupaten Blitar untuk mencermati calon PPS yang akan direkrut. Pada surat rekomendasi bernomor 066/K.JI-03/PM.00.02/III/2020 pada 4 Maret 2020.

Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Abdul Hakam Sholahuddin menegaskan rekomendasi yang dilayangkan ke KPU



Koordinator Pengawasan Bawaslu Kabupaten Blitar, Priya Hari Santosa menunjukkan data temuannya

Kabupaten Blitar berisi tiga poin. Pertama, KPU melakukan klarifikasi kepada calon anggota PPS yang namanya terindikasi anggota dan pengurus parpol. Kedua, memastikan dalam proses pembentukan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketiga, memberikan jawaban tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap calon anggota PPS yang terdaftar dalam Sipol dan SK Parpol tersebut. "Kami berharap proses rekrutmen calon anggota PPS bisa berlangsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," pungkas Hakam. (ais)



**RIA MIRANDA,
MENCOBA KELUAR
ZONA NYAMAN**

Indria Miranda (34 tahun) adalah salah seorang perancang busana Indonesia. Ria yang memiliki bren Riamiranda ini termasuk salah seorang di antara empat orang tokoh perancang busana yang dianggap mempengaruhi tren pemakaian busana muslim hijab.

Karyanya yang banyak mengeksplorasi garis-garis, sentuhan pastel dan girly yang feminin serta berkarakter kuat banyak disukai para hijabers.

Kini ia mencoba keluar dari zona nyaman. Memulai hal baru, termasuk soal tampilan dan warna. Yang tertuang dalam rancangan terbarunya untuk musim semi dan musim panas 2020.

“Koleksi kali ini berbeda dari sebelumnya. Warnanya lebih cerah dari biasanya warna pastel. Ada fuchia, line green, dan terakota,” tutur Ria kepada sejumlah media.

Ria berpartisipasi dalam perhelatan 'Fashion Rhapsody' yang berlangsung pada akhir Februari 2020, di Jakarta.

Rancangan Ria Miranda kali ini bertajuk “Bias”. Proses kreatifnya merancang koleksi ini terinspirasi pembiasan cahaya.

Sebanyak 32 tampilan karya Ria yang diperagakan para model. Masing-masing dengan variasi bentuk gaun, tunik, atasan, dan luaran atau outer.

Selain warna, busana yang dirancang lewat lini Ria Miranda Signature ini menggunakan material yang sebelumnya tidak biasa dia gunakan. Seperti denim dan kukit, sebagai aksesoris.

Dengan keluar dari zona nyaman, Ria merasa bisa melihat hal-hal baru. Ia berusaha mengambil sudut pandang baru.

Menurut Ria, dalam pembiasan

cahaya, “kita tinggal mengatur sudut pandang untuk mendapatkan hal tertentu sesuai yang kita harapkan,” pungkasnya.

Merintis karier sejak 2009, desainer asal Padang ini berhasil mendapatkan tempat spesial di hati para pelanggan setianya.

Para pelanggan yang juga disebut RMLC (Ria Miranda Loyal Customer) selalu siap sedia memborong semua produknya. Padahal, harga produknya terhitung tak murah untuk kebanyakan orang Indonesia. Satu potong blouse dijual dengan harga Rp 700 ribuan.

Keberhasilan Ria Miranda ini tak dibangun dalam semalam. Dalam satu dekade ini, ada jatuh bangun, suka duka, yang menyertai perjalanannya (Ist).



INI CARA HEMAT, KERINGKAN RAMBUT **TANPA HAIR DRYER**



Mengeringkan rambut terbilang cukup memakan waktu. Namun ada cara mudah mengeringkan rambut setelah keramas. Tanpa kipas angin atau hair dryer.

Terlebih jika Anda harus buru-buru dan tak memiliki waktu banyak untuk mengeringkannya. Nah berikut tips dan trik mengeringkan rambut dengan cepat.



1. Keringkan dengan udara

Mengeringkan rambut menggunakan udara bebas adalah cara terbaik. Namun, jika memang Anda harus menggunakan pengering rambut, sebaiknya tunggu beberapa waktu terlebih dahulu setelah mencuci untuk mengeringkannya.

Kebiasaan ini akan membuat rambut lebih mudah disisir karena sudah memiliki ikal yang alami.



2. Gunakan handuk

Bila Anda ingin mengeringkan rambut secara efisien, pilihlah handuk microfiber. Ini pilihan yang lebih baik. Handuk ini menyerap dua kali lebih banyak air, sehingga memperpendek waktu pengeringan.

Jika Anda memiliki rambut kering, gunakan kaos katun yang lebih lembut pada rambut sehingga mengurangi kerusakan.



3. Menyikat rambut

Anda tidak perlu menyikat semua rambut. Beberapa sapuan sebelum dan selama pengeringan dapat mempercepat proses.

Menyisir juga dapat membuat rambut lebih lembut dan lentur, sehingga lebih cepat kering.



4. Mengeringkan dengan kondisioner

Kondisioner tidak hanya dipakai untuk memanjakan rambut dan membuatnya lebih mudah untuk disisir, tetapi juga akan mengeringkan rambut lebih cepat. Kondisioner akan membuat rambut lebih tahan terhadap air (1st).

HADIR DI INDONESIA, XIAOMI NOTE 10 DIBEKALI **KAMERA 108 MP**



Kehadiran Xiaomi Mi Note 10 di Indonesia resmi diumumkan pada pekan lalu. Dan smartphone yang dibekali dengan lima buah kamera belakang itu dijual perdana di Indonesia (Selasa, 25/2/2020).



Penjualan Mi Note 10 dilakukan di toko ritel Mi Store, Erafone, dan official store Xiaomi Indonesia di Blibli.com.

Harga Mi Note 10 dipatok sebesar Rp 6,2 juta, lebih murah dibandingkan Mi Note 10 Pro sebelumnya yang dhargai Rp 7 juta pada Januari lalu.

Perbedaan Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro terletak di kapasitas RAM dan memori internal. Mi Note 10 mengukung kombinasi yang lebih kecil, yakni 6 GB/ 128 GB, dengan dapur pacu Snapdragon 730 G, seperti dihimpun dari akun Instagram Xiaomi Indonesia.

Spesifikasi lain antara kedua ponsel terbilang identik. Baik Mi Note 10 Pro maupun Mi Note 10 sama-sama dibekali lima buah kamera belakang.

Kelima kamera itu terdiri dari kamera utama (wide) 108MP, kamera telephoto 5MP, kamea portrait 12 MP, kamera ultra-wide 20MP, dan kamera makro 2MP.

Kamera depan ponsel ini termuat dalam notch bergaya waterdrop di sisi atas layar

dan memiliki resolusi sebesar 32MP.

Spesifikasi lain termasuk layar AMOLED FHD+ 6,47 inci yang dilapisi Gorilla Glass 5, baterai berkapasitas 5.260 mAh yang mendukung fitur fast charging 30 watt, dan port USB type C.

Sistem operasinya Android 9 Pie dengan antarmuka MIUI 11. Mi Note 10 sendiri merupakan ponsel versi global dari ponsel Mi CC9 Pro yang sebelumnya sudah dipasarkan lebih dulu di China tahun lalu.

Xiaomi memasarkan Mi Note 10 di Indonesia dalam tiga varian warna, yaitu Aurora Green, Glacier White dan Midnight Black (Ist).

LENTERA HARIAN "LENTERA TODAY"
PENANGGUNG JAWAB TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTOR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO : Jakarta : Hariris Shofa | Surabaya : AGUSTINA WIDYAWATI, LUTFI YUHANDI, TARMUJI TALMACSI (ID Sertifikasi 16216) , JUNAIDI (ID Sertifikasi 4175), IMAN GHOZALI (ID Sertifikasi 11563),
ARDINI PRAMITHA, | Malang Raya-Batu: EKA NURCAHYO (ID Sertifikasi 4686), MOH.AMRULLAH, | Sidoarjo: M JAINUL ARIFIN, | Gresik : ASEPTA YOGA P (ID Sertifikasi 3189)
Pasuruan-Probolinggo: ARIE YOENIANTO (ID Sertifikasi 8372) | Bondowoso-Situbondo-Lumajang-Jember-Banyuwangi: IMAN SANTOSO, | Blitar-Tulungagung-Trenggalek : ARIEF SUKAPUTRA ,
IRVAN FAUZI, | Kediri-Nganjuk-Jombang : GATOT SUNARKO, | Madiun-Ponorogo : RACHMAD SURYADI, | Mojokerto: WISNU JOEDHA

DIREKTUR BISNIS DAN KOMERSIAL SUPARTI, SH, MM MANAGER HRD SUHARDIMAN EKO PRASETYO
PENASEHAT HUKUM Dr. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH MARKETING COMMUNICATION DJOKO PRASETYO SEKRETARIS ISTIDHA NUR AMANAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN SEPTIANUS DAKOSTA, KIKI AMALIA GUYEN
ALAMAT REDAKSI JL. RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, TELP 03187854491 PENERBIT PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA
ALAMAT BIRO MALANG JL. KEBALEN WETAN 1040 B MALANG ALAMAT PERCETAKAN SMILE GRAFIKA, JL.RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA
REDAKSI 031-87854491 IKLAN 031-87854491 NIB 91205006801134 HARGA IKLAN RP 10.000/ MM/ KOLOM.

MAU AWET MUDA KAYAK SON YE-JIN, INI RAHASIANYA

사랑의 불시착

Penampilan para aktris Korea memang menjadi sorotan, karena mereka terlihat awet muda di usia menginjak kepala 4. Salah satunya adalah Kayak Son Ye-jin, aktris bintang serial 'Crash Landing on You'. Apa rahasianya?



Pecinta drama Korea Crash Landing on You pasti paham betapa berkilauanya kulit wajah Son Ye-jin yang memerankan Yoon Se-ri dalam drama tersebut. Banyak orang yang memuji kesehatan kulit wajahnya yang terlihat menonjol saat dia memakai power suit kebanggaannya atau saat dia memakai baju rumah sakit. Kulitnya tetap terlihat sempurna dan glowing.

Untuk menjaga kulit wajahnya agar tetap sehat dan berkilau, Ye-jin tak pernah lupa untuk mengecek kondisi kulitnya. Selain itu, mengutip Cleo Singapore dia juga punya ritual rutin untuk merawat kulit wajahnya.

"Aku dulu menggunakan masker wajah hanya 1-2 kali dalam seminggu. Tapi sekarang aku melakukannya hampir setiap hari. Dulu juga aku mendengar tidak bagus mencuci wajah di pagi hari. Tapi seiring berjalannya waktu aku memahami bahwa aku memiliki kulit berminyak, jadi aku membersihkan wajahku setiap pagi dan malam, seberapa sibuknya aku," ujarnya.

Masker ini menjadi rahasia perawatan kulit wajahnya terutama jika dia sedang pergi ke luar negeri. Selain itu dia juga men-

jaga kulit wajahnya dengan memastikan wajahnya selalu bersih.

"Sebelumnya saya mendengar bahwa tak baik untuk membersihkan wajah dengan pembersih di pagi hari, jadi saya hanya akan membersihkan kulit dengan air," katanya.

"Tapi saya menyadari bahwa kulit saya berminyak, jadi saya harus membersihkan setiap pagi. Bahkan ketika jadwal saya berakhir larut malam, saya masih akan membersihkan wajah. Saya lebih berhati-hati dalam membersihkan."

Hanya saja dia mengklaim tak punya ritual skincare yang kompleks. Dia juga bukan termasuk 'pengabd' 10 langkah skincare yang selama ini digaungkan jadi senjata perawatan kulit wajah yang sempurna. "Saya lebih suka sesuatu yang sederhana, sekitar satu atau dua langkah. Saya memiliki kulit berminyak, jadi memakai terlalu banyak bahan tidak baik untuk kulit saya, karena itu saya biasanya menggunakan yang melembapkan."

Sumbang Rp 1,17 M untuk Corona

Tak hanya cantik, Son Ye Jin juga memiliki hati mulia. Dia menyumbangkan 100 juta won (sekitar 1,17 miliar rupiah)



untuk memerangi wabah virus corona di Korea Selatan. Uang itu disumbangkan melalui cabang Daegu Community Chest of Korea.

"Daegu adalah kampung halaman saya, tempat saya dilahirkan dan dibesarkan, serta tempat tinggal orang tua saya sekarang. Jadi itu (Daegu) adalah tempat yang sangat istimewa bagi saya dan berita (wabah COVID-9) di Daegu sangat memilukan bagi saya," katanya.

"Saya harap (sumbangan saya) dapat memberikan semacam bantuan praktis kepada penduduk berpenghasilan rendah yang sangat membutuhkan bantuan sekarang lebih dari sebelumnya, serta bantuan dalam perawatan dan pencegahan COVID-19," katanya. (ins)

Iuran BPJS, (dari hal 1)

Tarik ulur kenaikan BPJS Kesehatan memang terus meruncing karena dianggap membebani rakyat. Kalangan akar rumput hingga anggota parlemen terus menyampaikan penolakannya. Kabar gembira pun hadir, Senin (9/3), setelah Mahkamah Agung (MA) mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diajukan Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

"Menyatakan Pasal 34 ayat 1 dan 2 Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata juru bicara MA, hakim agung Andi Samsan Nganro.

Duduk sebagai ketua majelis yaitu Supandi dengan anggota Yosran dan Yodi Martono Wahyunadi. Menurut MA, Pasal 34 ayat 1 dan 2 bertentangan dengan Pasal 23 A, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945. Selain itu juga bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 ayat 3 UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

"Bertentangan dengan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 jo Pasal 171 UU Kesehatan," ucap majelis.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah akan melihat dampak dari pembatalan tersebut terhadap BPJS Kesehatan. Sebab, pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini akan bisa saja berdampak pada keuangan lembaga tersebut.

"Ya ini kan keputusan yang memang harus lihat lagi implikasinya kepada BPJS gitu ya. Kalau dia secara keuangan akan terpengaruh ya nanti kita lihat bagaimana BPJS Kesehatan akan bisa sustain," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (9/3).

Menurut Sri Mulyani, BPJS Kesehatan harus tetap memberikan layanan kepada para pesertanya. Meski saat ini defisit yang dialami BPJS Kesehatan masih besar."Dari sisi memberikan untuk jasa kesehatan kepada masyarakat secara luas. Namun secara keuangan mereka merugi, sampai dengan saya sampaikan

dengan akhir Desember, kondisi keuangan BPJS meskipun saya sudah tambahkan Rp 15 triliun dia masih negatif, hampir sekitar Rp 13 triliun," jelas dia.

Dengan adanya pembatalan kenaikan iuran ini, kata Sri Mulyani, pemerintah akan melihat apa saja dampaknya bagi operasional dan keuangan BPJS Kesehatan ke depan."Jadi kalau sekarang dengan hal ini, adalah suatu realita yang harus kita lihat. Kita nanti kita review lah ya," tandas dia.

Untuk diketahui, putusan MA bermula saat KPCDI keberatan dengan kenaikan iuran itu. Mereka mendaftarkan hak uji materiil 5 Desember 2019. Pengacara KPCDI Rusdianto Matulatuw saat itu mengatakan gugatan dilayangkan karena banyak peserta, salah satunya KPCDI yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen.

Ruadianto menegaskan kenaikan iuran BPJS sebesar 100 persen tak logis dan sangat tidak manusiawi. Padahal, sebelum memutuskan untuk menaikkan iuran BPJS, negara seharusnya menghitung berdasarkan daya beli masyarakat yang disesuaikan dengan tingkat inflasi."Nah, ini menaikkan (inflasi) tidak sampai 5 persen, tapi iuran BPJS dinaikkan 100 persen, inikan tidak masuk akal," ucap dia.

Menurut Rusdianto Perpres 75 Tahun 2019 ini bertentangan dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial."Ya undang-undangnya kan mengatakan besaran iuran itu ditetapkan secara berkala sesuai perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan dasar hidup yang layak," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Umum KPCDI Tony Samosir mengatakan kebijakan menaikkan iuran tersebut dikhawatirkan akan membebani peserta BPJS Kesehatan di kelas mandiri yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu tapi belum terdaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Tony memperkirakan kenaikan iuran BPJS 100 persen bisa membuat banyak pasien menunggak bayaran. Akhirnya, masyarakat tidak bisa menikmati layanan kesehatan yang merupakan hak setiap warga negara

Apalagi, kata Tony banyak pasien gagal ginjal yang PBI-nya dicabut tanpa pemberitahuan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial akibat dari cleansing data.

"Laporan yang kami terima, pasien tidak bisa cuci darah. Mereka ini berpotensi gagal bayar iuran. Gagal bayar iuran membuat Kartu BPJS Kesehatannya tidak aktif. Mereka tidak bisa cuci darah dan berpotensi mengancam nyawanya," ujar dia.

Untuk diketahui, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengklaim mengalami defisit Rp1,5 triliun setiap bulan. Defisit terjadi lantaran jumlah iuran yang diterima timpang dari biaya bulanan yang mereka keluarkan. BPJS Kesehatan mengaku mengantongi dana Rp6 triliun dari iuran peserta per bulan. Tapi, biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan mencapai Rp7,5 triliun.

Kalau diakumulasi sejak 2014 hingga Juni 2019, menyebut total biaya yang sudah dikeluarkan BPJS Kesehatan terkait layanan kesehatan sebesar Rp 395 triliun. Sementara, hingga akhir tahun lalu tercatat Rp345,75 triliun.

Pengeluaran BPJS Kesehatan sejak 2014 sampai 2018 diklaim lebih rendah dari pendapatan iuran. Tercatat, iuran yang dibayarkan peserta hanya Rp317,04 triliun. Ini artinya ada selisih antara iuran dan biaya yang dikeluarkan sepanjang 2014-2018 sebesar Rp28,71 triliun.

Sebelumnya, BPJS Kesehatan memang sudah menyiapkan beberapa skenario untuk memperkecil deficit. Ada tiga opsi yang bisa dilakukan, yakni menyesuaikan besaran iuran, mengatur ulang manfaat yang diberikan, dan suntikan dana tambahan. Untuk suntikan dana pemerintah pada 2015, BPJS Kesehatan telah menerimanya sebesar Rp 5 Triliun, 2016 (Rp 6,8 Triliun), 2017 (Rp 3,6 Triliun), dan 2018 sebesar Rp 10,25 Triliun. (fa,ist)

HORE! 2020 HARI LIBUR DITAMBAH 4 HARI



Jakarta - Di tengah lesunya perekonomian dunia dan ancaman wabah corona, berbagai jurus dikeluarkan pemerintah untuk memicu perputaran ekonomi. Terbaru, pemerintah merevisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020.

Revisi Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2020 ini disepakati dalam rapat di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (9/3). Ada tambahan 4 hari Cuti Bersama. Jumlah hari libur cuti bersama pada 2020 menjadi 24 hari usai direvisi. Bertambah 4 hari dari jumlah yang sebelumnya ditetapkan.

"Menambah 4 hari libur. Semula ditetapkan 20 hari menjadi 24 hari," ucap Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi di kantornya, Jakarta, Senin (9/3).

Tambahan 4 hari Cuti Bersama yaitu di tanggal 28-29 Mei, 21 Agustus, dan 30 Oktober. Dua hari di bulan Mei menjadi tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Satu hari tambahan Cuti Bersama lagi ditetapkan di tanggal 21 Agustus untuk melengkapi libur Tahun Baru Hijriah. Satu hari tambahan Cuti Bersama di bulan Oktober melengkapi libur Maulid Nabi.

Muhadjir mengatakan revisi jumlah hari libur nasional sudah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dia menyebut Jokowi ingin hari libur atau cuti bersama harus memberikan dampak positif terhadap peningkatan ekonomi nasional

Selain itu, lanjutnya, Jokowi ingin masyarakat dapat memiliki waktu lebih banyak hari libur untuk mengenal Indonesia. "Agar saling kenal, tahu,

membangun Indonesia, NKRI, maka hari libur bisa dimanfaatkan," kata Muhadjir.

Rapat evaluasi hari libur nasional dan cuti bersama dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, serta Menteri Agama Fachrul Razi. Dalam rapat juga hadir sejumlah perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan hingga Kepolisian RI.

Terpisah, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan banyaknya hari libur perlu dipertimbangkan kembali. "Kemudian soal revisi libur-libur nasional ada sebagian berpendapat kita terlalu banyak libur. Itu perlu dipertimbangkan baik buruknya untuk kelangsungan dari pada aktivitas di Indonesia ini," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. "Banyak pendapat yang mengemukakan libur kita terlalu banyak ya," lanjut politikus Gerindra itu.

Apakah revisi libur yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan waktu Lebaran tahun ini, Dasco mengatakan perlu ada sinkronisasi. Sebab, hal ini menyangkut sensitivitas keyakinan agar tak menimbulkan kegaduhan. "Ya saya pikir segala sesuatu dapat di sinkronkan ya soal apa Lebaran itu kadang sering sama kadang sering enggak. Ini mesti diantisipasi untuk supaya tidak terjadi kerisauan atau kegaduhan di masyarakat. Karena ini soal agama ini isu sensitif," kata Dasco.

Ekonomi RI Dikoreksi

Lembaga pemeringkat Moody's

menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 4,9% menjadi 4,8% pada tahun ini. Virus corona menjadi pemicu koreksi tersebut karena menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi global. "Risiko resesi global telah meningkat. Semakin lama wabah ini terjadi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, permintaan terganggu dan mengarah ke resesi," demikian tertulis dalam laporan Moody's Investors Service berjudul Global Macro Outlook 2020-21. Moody's Corporation (NYSE: MCO) adalah induk dari Moody's Investor Service yang menyediakan jasa analisis keuangan dan analisis atas lembaga usaha dan lembaga pemerintah. Perusahaan ini juga memberikan peringkat atas kelayakan kredit dari peminjam dengan menggunakan peringkat standar. Lembaga yang juga dimiliki Warren Buffet dan Davis Selected Advisers.

Bukan hanya Indonesia, negara-negara G-20, prediksi pertumbuhan ekonominya hanya 2,1%, turun 0,3% dari angka perkiraan sebelumnya. Pelemahan ekonomi, terutama akan dirasakan oleh Tiongkok, tempat wabah virus tersebut bermula.

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok perkiraannya turun dari 5,2% ke 4,8%. Lalu, Korea Selatan hanya tumbuh 1,4% dari perkiraan sebelumnya di 1,9%. Jepang angkanya di 0%. Italia diperkirakan akan mengalami resesi. Pertumbuhannya diperkirakan minus 0,5%. Jerman akan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, dari perkiraan 1% menjadi 0,3%. Amerika Serikat ekonominya hanya naik 1,5% dari prediksi awal 1,7%. (ist,ins)

DAFTAR TAMBAHAN LIBUR NASIONAL



28-29 MEI

TAMBAHAN LIBUR LEBARAN

21 AGUSTUS

TAMBAHAN LIBUR TAHUN BARU HIJRIAH

30 OKTOBER

TAMBAHAN LIBUR MAULID NABI

